



RASIONALITAS BIROKRATIS DAN ETIKA EKOLOGIS DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: STUDI DI MAN KOTAWARINGIN TIMUR

Muhamad Isa Ansyori¹, Desi Erawaty², Masdar Hilmy³

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya, Indonesia

³Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: muhamadisa.2510310034@uin-palangkaraya.ac.id¹, desi.erawati@iain-palangkaraya.ac.id², masdar.hilmy@gmail.com³

Article Info

Received	Accepted	Published
29 April 2026	16 Mei 2026	18 Mei 2026

Keywords:

Bureaucratic rationality,
Ecological ethics,
Islamic education management,

ABSTRACT

This article aims to analyze the dominance of bureaucratic rationality and examine the integration of ecological ethics in Islamic education management through a qualitative study at MAN Kotawaringin Timur. The approach employed is qualitative, utilizing a field study design that incorporates in-depth interviews, observations, and documentation of the school principal, teachers, educational staff, and students. Data analysis was conducted interactively through data reduction, presentation, and drawing of conclusions. The results of the study indicate that educational management practices remain dominated by bureaucratic rationality, which is oriented toward administrative compliance, performance indicators, and formal procedures. Decision-making patterns tend to be top-down and limit collegial participation. On the other hand, ecological ethical values from an Islamic perspective, such as the concepts of khalifah, amanah, and mizan, have begun to be internalized in madrasah cultural practices, yet they have not been systematically integrated into institutional policies and management. This article identifies a gap between bureaucratic rationality and ecological ethical values in Islamic education management. Therefore, this article proposes an ecological amanah-based model of Islamic education management that integrates administrative efficiency with ethical responsibility and environmental sustainability. This model is expected to serve as an alternative in developing a more reflective, participatory, and sustainability-oriented governance framework for Islamic education.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Rasionalitas birokratis,
Etika ekologis,
Manajemen pendidikan Islam,

Artikel ini bertujuan menganalisis dominasi rasionalitas birokratis dan mengkaji integrasi etika ekologis dalam manajemen pendidikan Islam melalui studi kualitatif di MAN Kotawaringin Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi lapangan, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan

Journal homepage: <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/An-Nadzir/index>

Dipublikasikan oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAI Sangatta Kutai Timur, Jl. Soekarno-Hatta, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur.

bahwa praktik manajemen pendidikan masih didominasi oleh rasionalitas birokratis yang berorientasi pada kepatuhan administratif, indikator kinerja, dan prosedur formal. Pola pengambilan keputusan cenderung *top-down* dan membatasi partisipasi kolegial. Di sisi lain, nilai-nilai etika ekologis dalam perspektif Islam, seperti konsep khalifah, amanah, dan *mizan*, telah mulai diinternalisasikan dalam praktik kultural madrasah, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan dan manajemen kelembagaan. Artikel ini menemukan adanya kesenjangan antara rasionalitas birokratis dan nilai etika ekologis dalam manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam artikel ini menawarkan model manajemen pendidikan Islam berbasis amanah ekologis yang mengintegrasikan efisiensi administratif dengan tanggung jawab etis dan keberlanjutan lingkungan. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pengembangan tata kelola pendidikan Islam yang lebih reflektif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan manajemen pendidikan Islam selama beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengadopsi model-model manajerial modern yang berakar pada paradigma administrasi Barat. Perkembangan manajemen pendidikan Islam selama beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengadopsi model-model manajerial modern yang berakar pada paradigma administrasi Barat. Prinsip-prinsip dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dikembangkan oleh Henri Fayol dan George R. Terry telah menjadi acuan utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Pendekatan ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas formal sebagai indikator keberhasilan organisasi.¹

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya orientasi madrasah terhadap sistem akreditasi, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan tata kelola berbasis indikator kinerja. Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 82% madrasah aliyah telah mengimplementasikan sistem manajemen berbasis evaluasi kinerja administratif dan digitalisasi pelaporan kelembagaan melalui EMIS dan e-RKAM. Selain itu, sekitar 76% madrasah menempatkan capaian akreditasi dan kepatuhan administratif sebagai prioritas utama dalam perencanaan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik manajemen pendidikan Islam di Indonesia semakin dipengaruhi oleh logika rasionalitas birokratis yang menekankan keteraturan prosedural, efisiensi organisasi, dan pengukuran berbasis indikator formal.²

¹ Bush, T. (2003). *Theories of educational leadership and management*. sage; Hoy, W. K., & Miskel., C. G. (2019). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. 10th ed. New York: McGraw-Hill; Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management*. 15th ed. Boston: Pearson.

² Widiastuty, H., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). "Reconstructing Rationalization in Islamic Education: A Weberian Perspective. *Edukasi Islami*, 14(2), 379–400; Hariyanti, R., Mustika, Agus, A., Namiri, Z., & Pahrudin, A. (2024). Islamic Education Management Paradigm and Dynamics of Contemporary

Namun demikian, dominasi pendekatan administratif tersebut belum sepenuhnya berhasil mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam secara substantif ke dalam praktik manajerial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis dalam pengelolaan pendidikan Islam masih bersifat normatif dan belum teroperasionalisasi secara sistematis dalam kelembagaan.³ Survei nasional Direktorat GTK Madrasah tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 68% guru madrasah mengaku lebih banyak mengalokasikan waktu pada penyusunan administrasi pembelajaran dibandingkan pengembangan inovasi pedagogik dan penguatan karakter peserta didik. Selain itu, 64% kepala madrasah menyatakan bahwa tuntutan pelaporan administrasi dan akreditasi menjadi fokus utama pengelolaan lembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen madrasah masih sangat dipengaruhi oleh orientasi kepatuhan regulatif dan standar formal dibandingkan penguatan nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Akibatnya, manajemen pendidikan Islam cenderung berkembang dalam corak teknokratis yang menempatkan keberhasilan administratif sebagai ukuran dominan keberhasilan lembaga.⁴

Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber menjelaskan bahwa modernitas ditandai oleh dominasi rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang berorientasi pada efisiensi, kalkulasi, dan prosedur formal.⁵ Dalam konteks pendidikan Islam, rasionalitas ini tercermin dalam praktik birokrasi kelembagaan, sistem evaluasi berbasis indikator, serta orientasi kinerja yang berpotensi menggeser tujuan pendidikan dari pembentukan karakter menuju pencapaian administratif semata. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat terhadap rasionalitas birokratis dalam pengelolaan pendidikan Islam, termasuk pada tingkat madrasah.

Di sisi lain, dalam tradisi Islam terdapat landasan normatif yang kuat dalam pengelolaan kehidupan, termasuk pendidikan, yang berakar pada konsep khalifah, amanah, dan mizan. Konsep khalifah merujuk pada posisi manusia sebagai wakil Tuhan di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keteraturan sosial dan ekologis. Amanah dipahami sebagai tanggung jawab etis yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, sedangkan mizan mengandung makna keseimbangan dan harmoni dalam relasi antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Perspektif ini berkembang dalam kajian eko-teologi Islam yang menekankan hubungan integral antara manusia, alam, dan Tuhan. Seyyed Hossein Nasr menyatakan bahwa krisis ekologis modern merupakan manifestasi dari krisis spiritual yang disebabkan oleh dominasi paradigma antroposentris, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan dan memandang alam semata sebagai objek eksploitasi ekonomi dan material.⁶ Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini memposisikan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap efektivitas organisasi, tetapi juga terhadap keseimbangan sosial dan ekologis.

Dalam praktik pendidikan di Indonesia, nilai-nilai eko-teologi mulai diintegrasikan melalui berbagai program pendidikan lingkungan, pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan berbasis komunitas di madrasah dan pesantren. Sejumlah penelitian menunjukkan

Education in the Era of Kurikulum Merdeka. *Jurnal 12*, 10(2).

³ Amalia, D. P., & Manshur, A. (2024). "Islamic Education Management in the Perspective of the Quran and Hadith. *Firdaus Journal*, 4(1), 1–6.

⁴ Bush, T. (2003). *Theories of educational leadership and management*. sage; Widiastuty, H., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). "Reconstructing Rationalization in Islamic Education: A Weberian Perspective. *Edukasi Islami*, 14(2), 379–400.

⁵ Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press; Ritzer, G. (2020). *Modern Sociological Theory*. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

⁶ Nasr, S. H. (2015). *Islam and the Environmental Crisis*. Chicago: ABC International Group; Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Markfield: Kube Publishing.

bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kesadaran ekologis peserta didik.⁷ Namun demikian, implementasinya masih terbatas pada aspek pembelajaran dan belum terintegrasi secara sistematis dalam manajemen kelembagaan, seperti dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Keterbatasan integrasi nilai-nilai eko-teologi ke dalam tata kelola pendidikan menunjukkan bahwa transformasi ekologis dalam pendidikan Islam belum menyentuh dimensi kelembagaan secara mendalam. Padahal, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekologis secara simultan dalam praktik manajemen pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketegangan antara tuntutan birokrasi modern dan internalisasi nilai-nilai etis-ekologis berlangsung dalam praktik pengelolaan madrasah pada level empiris.

Dalam konteks lokal, fenomena ini juga dapat diamati dalam pengelolaan madrasah, termasuk di MAN Kotawaringin Timur, yang menghadapi tantangan ganda antara pemenuhan standar birokratis dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen. Ketegangan antara rasionalitas birokratis dan nilai-nilai etis-ekologis ini menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam melalui pendekatan empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian Widiastuty, Hilmy, dan Erawati lebih menekankan analisis teoritis rasionalisasi Weberian dalam pendidikan Islam tanpa mengkaji praktik empiris pada tingkat madrasah.⁸ Sementara itu, penelitian Taufikin berfokus pada integrasi eko-teologi dalam pembelajaran, bukan pada tata kelola kelembagaan.⁹ Serta penelitian Abdusshomad juga menempatkan isu ekologis dalam kerangka SDGs pendidikan Islam, namun belum menghubungkannya dengan dominasi rasionalitas birokratis dalam manajemen pendidikan.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan karena secara langsung mengkaji hubungan antara rasionalitas birokratis dan etika ekologis dalam praktik manajemen madrasah berbasis studi lapangan, sekaligus menawarkan model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis sebagai kerangka integratif antara efisiensi organisasi dan tanggung jawab etis-ekologis.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami praktik manajemen pendidikan Islam dari perspektif rasionalitas birokratis dan etika ekologis melalui studi kualitatif di MAN Kotawaringin Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model manajemen pendidikan Islam yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etis dan tanggung jawab ekologis yang kontekstual.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik manajemen pendidikan Islam dari perspektif rasionalitas birokratis dan etika ekologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan praktik sosial yang

⁷ Taufikin. (2025). Integrating Eco-Theology in Islamic Education. *El-Tarbawi*, 18(1), 1–32; Abdusshomad, A. (2026). Ecotheology and SDGs in Islamic Education. *IQRO Journal*, 9(1).

⁸ Hesty Widiastuty, Masdar Hilmy, and Desi Erawati, “Reconstructing Rationalization In Islamic Education : A Systematic Literature Review of Max Weber’s Bureaucracy Theory,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 02 (2025): 379–400, <https://doi.org/10.30868/ei.v14i02.8278>.

⁹ Taufikin Taufikin, “Integrating Eco-Theology In Islamic Education : A Case Study On Fostering Ecological Awareness Through Religious Pedagogy,” *El-Tarbawi* 18, no. 1 (2025): 1–32.

¹⁰ Alwazir Abdusshomad, “Revitalizing the Islamic Religious Education Curriculum in Higher Education : Integrating Ecotheology and Social Justice to Support the Sustainable Development Goals (SDGs),” *IQRO: Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (2026): 26–37.

terjadi dalam konteks nyata lembaga pendidikan.¹¹ Penelitian dilaksanakan di MAN Kotawaringin Timur karena madrasah ini merepresentasikan dinamika pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang menghadapi tuntutan birokrasi modern sekaligus menjalankan program berbasis nilai keislaman dan lingkungan. Selain itu, MAN Kotawaringin Timur dipilih karena memiliki status akreditasi unggul, aktif dalam program Adiwiyata, dan menerapkan sistem administrasi digital madrasah yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari tujuh informan utama, yaitu kepala madrasah, dua wakil kepala madrasah, dua guru, satu tenaga kependidikan, dan dua peserta didik yang terlibat dalam aktivitas kelembagaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi madrasah seperti Rencana Kerja Madrasah (RKM), dokumen evaluasi diri madrasah, laporan kegiatan, serta kebijakan internal yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.¹²

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan terkait praktik manajemen, proses pengambilan keputusan, serta nilai-nilai yang melandasinya. Observasi dilakukan melalui observasi partisipatif terbatas guna memahami dinamika organisasi dalam konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.¹³

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.¹⁴ Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses *coding* terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti orientasi administratif, pola pengambilan keputusan, partisipasi organisasi, praktik ekologis, dan integrasi nilai Islam. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks tematik dan tabel kategorisasi guna memudahkan identifikasi hubungan antara rasionalitas birokratis dan etika ekologis. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi tematik dengan menggunakan perspektif rasionalisasi Max Weber dan eko-teologi Islam Seyyed Hossein Nasr untuk memahami dinamika pengelolaan madrasah secara lebih komprehensif.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta melakukan *member checking* kepada informan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dan interpretasi peneliti. Validitas juga diperkuat melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan serta konsistensi analisis yang didasarkan pada kerangka teoretis yang digunakan.¹⁵

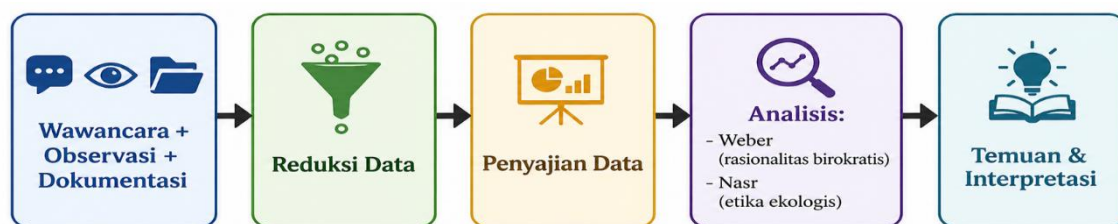
¹¹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage; Merriam, S., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Edisi ke-4. San Francisco: Jossey-Bass.

¹² Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks: Sage.

¹³ Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. Edisi ke-8. London: Routledge.

¹⁴ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

¹⁵ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage; Nowell, L. S., M., J., Norris, D. E., & White, N. J. M. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.



Gambar 1. Alur Analisis Data Penelitian Menggunakan Perspektif Weber dan Etika Ekologis Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Rasionalitas Birokratis dalam Pengelolaan Madrasah

Temuan penelitian di MAN Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa praktik manajemen masih didominasi oleh rasionalitas birokratis yang berorientasi pada kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, sekitar 70% aktivitas rapat dan pengelolaan kelembagaan difokuskan pada penyusunan laporan administrasi, evaluasi dokumen, dan persiapan akreditasi, sedangkan hanya sekitar 30% yang diarahkan pada pengembangan inovasi pembelajaran, refleksi nilai, dan penguatan budaya sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi administratif masih menjadi prioritas dominan dalam praktik manajemen madrasah. Aktivitas-aktivitas tersebut cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan penguatan aspek substantif pendidikan, seperti pembentukan karakter, refleksi nilai, dan inovasi pembelajaran.

Temuan ini diperkuat oleh data wawancara dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam struktur organisasi madrasah. Kepala madrasah (KM-01) menyatakan:

“kami harus memastikan seluruh dokumen administrasi lengkap dan sesuai standar, karena hal tersebut menjadi indikator utama dalam penilaian akreditasi dan evaluasi kinerja lembaga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan madrasah lebih diarahkan pada pemenuhan standar administratif sebagai indikator keberhasilan lembaga. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya tekanan birokrasi dalam tata kelola madrasah. Sementara itu, wakil kepala madrasah bidang kurikulum (WK-02) juga menegaskan:

“sebagian besar energi kami terserap untuk memastikan dokumen kurikulum, perangkat pembelajaran, dan laporan sesuai dengan regulasi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa beban administratif tidak hanya dirasakan pada level pimpinan, tetapi juga pada pengelola akademik. Fokus pada kelengkapan dokumen menyebabkan perhatian terhadap pengembangan pembelajaran menjadi terbatas. Dari perspektif guru, Guru Pendidikan Agama Islam (G-03) mengungkapkan:

“terkadang kami lebih fokus pada kelengkapan administrasi pembelajaran daripada mengeksplorasi metode yang lebih inovatif.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tuntutan administrasi turut memengaruhi praktik pembelajaran guru. Guru cenderung memprioritaskan pemenuhan perangkat administrasi dibandingkan pengembangan inovasi pembelajaran. Sementara itu, Guru Mata Pelajaran Umum (G-04) menyatakan:

“yang penting administrasi lengkap terlebih dahulu, karena itu yang akan diperiksa. Proses pembelajaran sering menyesuaikan dengan kondisi tersebut.”

Pernyataan G-04 memperkuat temuan sebelumnya bahwa budaya kerja di madrasah lebih berorientasi pada kepatuhan administratif. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian proses pembelajaran terhadap kebutuhan evaluasi formal lembaga. Tenaga administrasi (TU-05) juga memberikan perspektif pendukung:

“setiap kegiatan harus memiliki dokumentasi. Jika tidak terdokumentasi, maka dianggap tidak ada.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi menjadi aspek penting dalam sistem tata kelola madrasah. Keberadaan dokumen dipandang sebagai bukti utama pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, hasil wawancara dengan peserta didik (S-06) menunjukkan dampak tidak langsung dari kondisi tersebut:

“kami jarang mengetahui program sekolah selain yang berkaitan dengan kegiatan formal. Yang sering ditekankan adalah aturan dan kedisiplinan.”

Pernyataan peserta didik menunjukkan bahwa dominasi budaya administratif turut memengaruhi pengalaman pendidikan siswa. Sekolah lebih dikenal melalui aspek formal dan kedisiplinan dibandingkan program pengembangan partisipasi atau kreativitas siswa. Dalam perspektif Weber, kondisi ini mencerminkan dominasi rasionalitas instrumental yang menempatkan prosedur formal dan kalkulasi administratif sebagai dasar utama tindakan organisasi. Akibatnya, pola kepemimpinan cenderung bersifat top-down karena keputusan strategis lebih diarahkan untuk memenuhi tuntutan birokrasi eksternal dibandingkan membangun partisipasi kolektif dalam pengembangan nilai pendidikan Islam.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan cenderung bersifat *top-down*, di mana kepemimpinan mendominasi dalam perumusan kebijakan strategis. Keterlibatan guru dalam proses perencanaan masih terbatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perumusan kebijakan.

Aspek	Hasil Temuan	Informan	Kutipan Wawancara	Frekuensi Temuan	Triangulasi Metode
Pengambilan keputusan	Bersifat top-down dan terpusat pada pimpinan	KM-01, WK-02	“Keputusan strategis biasanya berasal dari pimpinan”	4 kali muncul	Wawancara, observasi rapat, dokumentasi kebijakan
Orientasi kerja	Berorientasi administratif dan kepatuhan dokumen	G-03, G-04	“Yang penting administrasi lengkap terlebih dahulu”	6 kali muncul	Wawancara, observasi pembelajaran
Evaluasi kinerja	Berbasis indikator formal dan kelengkapan laporan	KM-01, TU-05	“Evaluasi didasarkan pada dokumen dan laporan”	5 kali muncul	Wawancara, studi dokumen evaluasi
Beban kerja	Didominasi tugas administratif dan pelaporan	WK-02, G-03	“Banyak waktu dihabiskan untuk laporan”	5 kali muncul	Wawancara, observasi aktivitas guru
Partisipasi organisasi	Keterlibatan guru dalam kebijakan masih terbatas	G-04	“Guru jarang dilibatkan dalam proses awal pembuatan kebijakan”	3 kali muncul	Wawancara, observasi koordinasi
Dampak pada siswa	Kultur sekolah cenderung formalistik dan disipliner	S-06	“Sekolah lebih fokus pada aturan dan kegiatan resmi”	3 kali muncul	Wawancara siswa, observasi kegiatan sekolah

Tabel 1. Temuan Rasionalitas Birokratis (Berbasis Informan)

Implementasi Etika Ekologis dalam Praktik Pendidikan Madrasah

Temuan penelitian di MAN Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa nilai-nilai etika ekologis telah mulai terinternalisasi dalam praktik pendidikan, namun masih berada pada tataran kultural dan belum terintegrasi secara sistematis dalam manajemen kelembagaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan administratif dilaksanakan hampir setiap minggu melalui rapat evaluasi, pelaporan, dan pengarsipan dokumen, sedangkan kegiatan ekologis seperti Jumat Bersih, penghijauan, dan kerja bakti hanya dilakukan secara periodik, rata-rata dua kali dalam satu bulan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perhatian kelembagaan terhadap aspek administratif jauh lebih dominan dibandingkan penguatan budaya ekologis secara sistematis.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan sistem perencanaan strategis madrasah maupun indikator kinerja organisasi. Nilai-nilai ekologis lebih tampak sebagai praktik kebiasaan daripada bagian dari kebijakan manajerial yang terstruktur.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan berbagai informan. Wakil kepala madrasah bidang kesiswaan (WK-02) menyatakan:

“kami memiliki program kebersihan dan penghijauan, tetapi belum secara khusus dimasukkan ke dalam perencanaan strategis madrasah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program lingkungan sudah ada, tetapi belum menjadi bagian dari kebijakan strategis lembaga secara formal. Guru Pendidikan Agama Islam (G-03) menambahkan:

“dalam pembelajaran, kami sering menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi belum ada pedoman khusus yang mengaitkannya dengan manajemen sekolah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai ekologis telah diajarkan dalam pembelajaran, namun implementasinya belum terintegrasi dalam sistem manajemen madrasah. Sementara itu, Guru Mata Pelajaran Umum (G-04) menyampaikan:

“kegiatan lingkungan lebih banyak merupakan inisiatif guru atau kegiatan rutin siswa; belum menjadi program besar yang terintegrasi.”

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekologis masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif individu, bukan program kelembagaan yang terstruktur. Dari perspektif tenaga kependidikan, staf administrasi (TU-05) menyatakan:

“belum ada kebijakan administratif khusus yang mengatur program lingkungan, sehingga pengelolaannya masih bersifat ad hoc.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek ekologis belum memiliki dukungan administratif yang memadai dalam tata kelola madrasah. Perspektif peserta didik (S-06) juga menunjukkan bahwa kesadaran ekologis mulai terbentuk, meskipun belum didukung oleh sistem yang kuat:

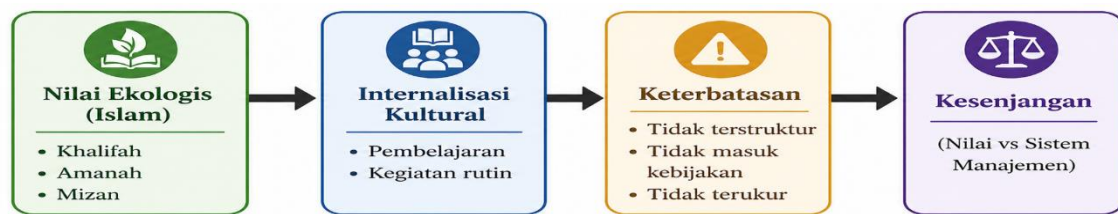
“kami sering mengikuti kerja bakti dan diajarkan menjaga kebersihan, tetapi lebih sebagai kebiasaan daripada aturan yang wajib.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya menjaga lingkungan telah dikenalkan kepada siswa, tetapi belum menjadi bagian dari sistem sekolah yang terstruktur. Selain itu, peserta didik lain (S-07) menambahkan:

“kegiatan lingkungan biasanya hanya ada pada program tertentu, tidak berlangsung secara berkelanjutan.”

Pernyataan ini memperkuat bahwa program lingkungan di madrasah masih bersifat temporer dan belum berjalan secara konsisten sebagai bagian dari manajemen kelembagaan. Sementara itu, dalam perspektif Seyyed Hossein Nasr, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai eko-teologi Islam seperti *khalifah*, *amanah*, dan *mizan* telah hadir pada tingkat kesadaran individu dan budaya, namun belum terinstitusionalisasi dalam sistem manajemen organisasi. Dengan kata lain, etika ekologis masih bersifat implisit dan belum menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis.

Analisis dokumen Rencana Kerja Madrasah (RKM) menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kelembagaan lebih banyak berfokus pada capaian akademik, administrasi, dan akreditasi, sementara indikator terkait keberlanjutan lingkungan dan etika ekologis belum dirumuskan secara eksplisit. Dari 24 program prioritas yang tercantum dalam RKM, hanya dua program yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan keduanya masih bersifat insidental. Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai ekologis belum menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan strategis madrasah.

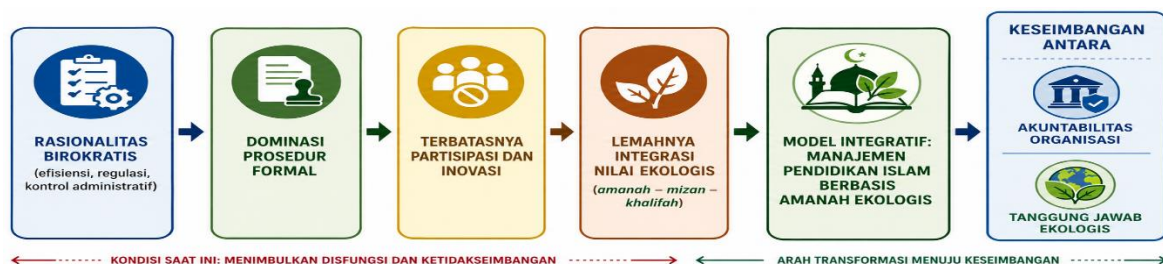


Gambar 2. Kesenjangan Integrasi Nilai Ekologis dalam Sistem Manajemen Madrasah

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan adanya dominasi rasionalitas birokratis dalam praktik manajemen pendidikan di MAN Kotawaringin Timur, yang ditandai dengan kuatnya orientasi pada kepatuhan administratif, standar formal, dan indikator kinerja. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik organisasi modern sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, di mana rasionalitas instrumental menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan organisasi.¹⁶ Dalam konteks pendidikan, rasionalitas tersebut melahirkan praktik manajerial yang menekankan efisiensi, kontrol administratif, dan kepatuhan prosedural. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi birokratis tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pengembangan nilai partisipatif, spiritual, dan ekologis dalam tata kelola madrasah.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya relasi ketegangan antara rasionalitas birokratis dan etika ekologis, di mana semakin dominan orientasi administratif, semakin terbatas integrasi nilai amanah, keseimbangan (*mizan*), dan kepedulian lingkungan dalam praktik pendidikan Islam. Hubungan tersebut menjadi dasar pengembangan model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis sebagai upaya integratif antara efisiensi organisasi dan tanggung jawab etis-ekologis.



Gambar 3. Model Integratif Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis dalam Kritik Rasionalitas Birokratis

Dominasi birokrasi ini juga menguatkan temuan sebelumnya bahwa manajemen pendidikan modern cenderung mengarah pada apa yang disebut sebagai *managerialism*, yaitu penekanan berlebihan pada metrik kinerja dan akuntabilitas formal.¹⁷ Hal ini tercermin dari tingginya beban administratif serta terbatasnya partisipasi guru dalam pengambilan keputusan strategis. Dari perspektif organisasi pembelajar (*learning organization*), kondisi ini justru menghambat terciptanya refleksi kolektif dan inovasi berkelanjutan dalam lembaga pendidikan.¹⁸

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan munculnya nilai-nilai etika ekologis dalam praktik pendidikan, meskipun masih bersifat kultural dan belum terinstitusionalisasi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif Islam dengan praktik manajemen kelembagaan. Dalam perspektif Seyyed Hossein Nasr,

¹⁶ Widiastuty, H., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). "Reconstructing Rationalization in Islamic Education: A Weberian Perspective. *Edukasi Islami*, 14(2), 379–400; Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2019). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

¹⁷ Bush, T. (2020). *Theories of Educational Leadership and Management*. 5th ed. London: Sage.

¹⁸ Senge, P. M. (2017). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.

kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk keterputusan antara dimensi spiritual dan praktik kehidupan modern, yang menjadi akar dari krisis ekologis dan moral.¹⁹

Lebih lanjut, kajian eko-teologi Islam menegaskan bahwa konsep *khalifah*, *amanah*, dan *mizan* tidak hanya merupakan nilai normatif, tetapi juga prinsip operasional yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan kehidupan, termasuk pendidikan.²⁰ Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian, nilai-nilai tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam sistem manajemen madrasah, khususnya pada aspek perencanaan strategis dan evaluasi kinerja. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa integrasi eko-teologi dalam pendidikan Islam masih terbatas pada level kurikulum dan belum menyentuh dimensi tata kelola kelembagaan.²¹

Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini juga relevan dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan tanggung jawab ekologis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung agenda tersebut melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dan ekologis.²² Namun, tanpa adanya transformasi pada tingkat manajemen, potensi tersebut sulit direalisasikan secara sistematis.

Selain itu, perspektif etika Islam juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi dan organisasi.²³ Dalam konteks manajemen pendidikan, hal ini berarti bahwa efisiensi administratif harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Penelitian juga menegaskan bahwa kerangka normatif Islam memiliki kapasitas untuk membangun sistem tata kelola yang tidak hanya rasional, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.²⁴

Berdasarkan temuan penelitian, model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis dikembangkan sebagai kerangka integratif antara rasionalitas organisasi modern dan nilai-nilai etis Islam. Model ini terdiri atas tiga dimensi utama. Pertama, dimensi rasional-administratif yang mencakup perencanaan, evaluasi kinerja, dan tata kelola berbasis akuntabilitas. Kedua, dimensi partisipatif-etis yang menekankan musyawarah, keterlibatan guru, dan penguatan budaya reflektif dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dimensi ekologis-spiritual yang mengintegrasikan nilai *khalifah*, *amanah*, dan *mizan* ke dalam visi kelembagaan, program kerja, serta indikator evaluasi organisasi. Melalui model ini, efisiensi administratif tidak dihilangkan, tetapi direorientasikan agar selaras dengan tanggung jawab sosial, spiritual, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, model amanah ekologis menjadi solusi atas ketegangan antara rasionalitas birokratis dan etika ekologis yang ditemukan dalam penelitian ini.

¹⁹ Nasr, S. H. (2015). *Islam and the Environmental Crisis*. Chicago: ABC International Group; Sayem, M. A. (2021). Eco-Religious Thought of Nasr. *Journal of Islam in Asia*, 18(1); Basith, Y., Bahri, S., & Setiawan, D. (2024). Contextualizing Nasr's Sufism in Education in the Modern Era. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 51–60.

²⁰ Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Markfield: Kube Publishing; Almirzanah, S. (2020). God, Humanity and Nature: Cosmology in Islamic Spirituality. *HTS Teologiese Studies*, 76(1), 1–10.

²¹ Taufikin. (2025). Integrating Eco-Theology in Islamic Education. *El-Tarbawi*, 18(1), 1–32; Abdusshomad, A. (2026). Ecotheology and SDGs in Islamic Education. *IQRO Journal*, 9(1).

²² Purnomo, J., Anantanyu, S., Saptaningtyas, H., Majeri, F., & Mangunjaya. (2024). Prophetic Approach in Environmental Education and Community Empowerment: A Case Study of Sustainable Pesantren Development. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 1–26.

²³ Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation; Beekun, R. I. (2016). *Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

²⁴ Ahmed, H. (2025). *Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep *sustainable governance* yang menekankan keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.²⁵ Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam tidak lagi dipahami semata sebagai sistem administratif, tetapi sebagai praktik etis yang berorientasi pada pengembangan manusia dan keberlanjutan peradaban.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan di MAN Kotawaringin Timur masih didominasi oleh rasionalitas birokratis yang berorientasi pada efisiensi administratif, kepatuhan prosedural, dan pencapaian indikator kinerja. Dominasi ini mencerminkan kuatnya rasionalitas instrumental yang membatasi ruang refleksi nilai, partisipasi, dan inovasi dalam manajemen pendidikan. Sementara itu, nilai-nilai etika ekologis Islam seperti *khalifah*, *amanah*, dan *mizan* telah mulai terinternalisasi dalam praktik kultural, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam manajemen kelembagaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rasionalitas birokratis dan etika ekologis.

Sebagai kontribusi, penelitian ini menawarkan model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis yang mengintegrasikan efisiensi administratif dengan nilai-nilai etis dan keberlanjutan. Model ini menempatkan manajemen pendidikan tidak hanya sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai praktik etis yang berorientasi pada tanggung jawab sosial dan ekologis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam melalui integrasi perspektif Weberian dan eko-teologi Islam. Secara praktis, temuan ini mendorong penguatan tata kelola madrasah yang lebih reflektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara praktis, model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Amanah Ekologis dapat diimplementasikan melalui integrasi indikator keberlanjutan lingkungan dalam Rencana Kerja Madrasah, penguatan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, serta penyusunan evaluasi kinerja yang tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga mencakup aspek etika, spiritualitas, dan tanggung jawab ekologis. Model ini berpotensi diterapkan pada madrasah lain sebagai alternatif tata kelola pendidikan Islam yang lebih reflektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dominasi birokrasi modern.

REFERENCES

- Abdusshomad, A. (2026). Ecotheology and SDGs in Islamic Education. *IQRO Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.24256/iqro.v9i1.9637>
- Ahmed, H. (2025). *Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>.
- Almirzanah, S. (2020). God, Humanity and Nature: Cosmology in Islamic Spirituality. *HTS Theologiese Studies*, 76(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i1.6130>.
- Amalia, D. P., & Manshur, A. (2024). "Islamic Education Management in the Perspective of the Quran and Hadith. *Firdaus Journal*, 4(1), 1–6.
- Andi Muda, Y. (2023). Ecotheology Perspective. *Jurnal Teologi*, 9(1). <https://doi.org/10.24071/jt.v9i01.2040>.
- Atta, N., & Sharifi., A. (2024). *Sustainability and Governance in Modern Societies*. Cham: Springer.
- Basith, Y., Bahri, S., & Setiawan, D. (2024). Contextualizing Nasr's Sufism in Education in the Modern Era. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 51–60. <https://doi.org/10.35316/jpii.v9i1.619>

²⁵ Atta, N., & Sharifi., A. (2024). *Sustainability and Governance in Modern Societies*. Cham: Springer; Andi Muda, Y. (2023). Ecotheology Perspective. *Jurnal Teologi*, 9(1).

- Beekun, R. I. (2016). *Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Bush, T. (2020). *Theories of Educational Leadership and Management*. 5th ed. London: Sage.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. Edisi ke-8. London: Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hariyanti, R., Mustika, Agus, A., Namiri, Z., & Pahrudin, A. (2024). Islamic Education Management Paradigm and Dynamics of Contemporary Education in the Era of Kurikulum Merdeka. *Jurnal* 12, 10(2).
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2019). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. 10th ed. New York: McGraw-Hill.
- Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Markfield: Kube Publishing.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage.
- Merriam, S., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Edisi ke-4. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nasr, S. H. (2015). *Islam and the Environmental Crisis*. Chicago: ABC International Group.
- Nowell, L. S., M., J., Norris, D. E., & White, N. J. M. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>.
- Purnomo, J., Anantanyu, S., Saptaningtyas, H., Majeri, F., & Mangunjaya. (2024). Prophetic Approach in Environmental Education and Community Empowerment: A Case Study of Sustainable Pesantren Development. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 1–26.
- Ritzer, G. (2020). *Modern Sociological Theory*. 10th ed. New York: McGraw-Hill.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management*. 15th ed. Boston: Pearson.
- Sayem, M. A. (2021). Eco-Religious Thought of Nasr. *Journal of Islam in Asia*, 18(1). <https://doi.org/10.31436/jia.v18i1.858>.
- Senge, P. M. (2017). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.
- Taufikin. (2025). Integrating Eco-Theology in Islamic Education. *El-Tarbawi*, 18(1), 1–32. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol18.iss1.art1>.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Widiastuty, H., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). “Reconstructing Rationalization in Islamic Education: A Weberian Perspective. *Edukasi Islami*, 14(2), 379–400. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i02.8278>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks: Sage.